



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

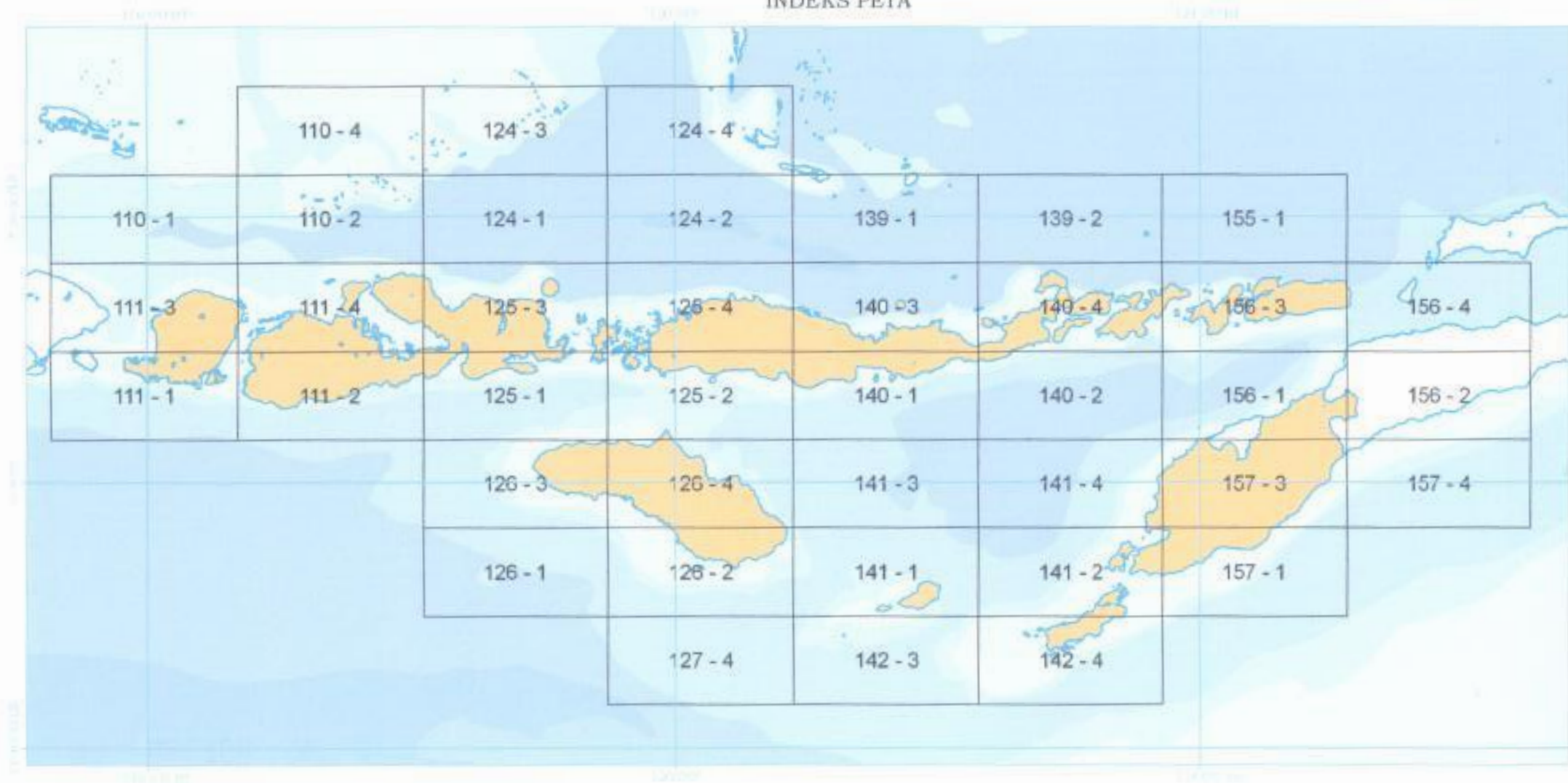
**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 56 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**PETA RENCANA POLA RUANG**  
**KEPULAUAN NUSA TENGGARA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PETA





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 500.000



Sistem Grid : Geografis  
Datum Horizontal : WGS 1984

### ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota Kecamatan
- ▲ Gunung
- - - Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- BLK — Batas Landas Kontinen (BLK), telah di ratifikasi
- - - BLK - - - BLK, perlu kesepakatan
- - - BLK - - - BLK, belum diratifikasi
- ZEE — Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
- - - ZEE - - - ZEE Indonesia, belum diratifikasi
- - - ZEE - - - ZEE Indonesia, perlu kesepakatan
- - - BLT - - - Batas Laut Teritorial (BLT)
- - - BLT - - - BLT, perlu kesepakatan



- Sungai
- Garis Pantai
- Danau/Waduk

### KAWASAN LINDUNG



- Lokasi Penyebaran Penyus
- Jalur Migrasi Paus
- Jalur Migrasi Lumba-lumba



- Cagar Alam
- Suaka Margasatwa
- Taman Nasional
- Taman Wisata Alam
- Taman Hutan Raya
- Taman Buru

Taman Nasional Laut/Taman Nasional Perairan



Taman Wisata Alam Laut



Hutan Lindung

### KAWASAN BUDI DAYA



Kawasan Peruntukan Pertanian dengan Kegiatan Peternakan



Kawasan Peruntukan Hutan



Kawasan Peruntukan Permukiman



Kawasan Peruntukan Pertanian



Kawasan Peruntukan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, masih dimungkinkan kawasan peruntukan lainnya dalam rencana tata ruang yang lebih detail



Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral dan Panas Bumi, masih dimungkinkan kawasan peruntukan lainnya dalam rencana tata ruang yang lebih detail



Kawasan Peruntukan Permukiman di Kawasan Peruntukan Hutan




Kawasan Peruntukan Pertanian di Kawasan Peruntukan Hutan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA KETERANGAN GAMBAR

### SEKTOR UNGGULAN

-  Sektor Unggulan Pariwisata
-  Sektor Unggulan Perikanan






### KAWASAN ANDALAN DARAT

- 1 Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya
- 2 Kawasan Andalan Bima
- 3 Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya
- 4 Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya
- 5 Kawasan Andalan Manure - Ende
- 6 Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya
- 7 Kawasan Andalan Ruteng - Bajawa
- 8 Kawasan Andalan Sumba

### KAWASAN ANDALAN LAUT

- 1 Kawasan Andalan Laut Selat Lombok
- 2 Kawasan Andalan Laut Flores
- 3 Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya
- 4 Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya

### KEDALAMAN LAUT

|  |               |
|--|---------------|
|  | 0 - 500 m     |
|  | 500 - 1000 m  |
|  | 1000 - 3000 m |
|  | 3000 - 5000 m |
|  | > 5000 m      |

### SUMBER PETA :

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2000
- Peta Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia BIG, Tahun 2011
- Peta Batimetri Skala 1:1.000.000, Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL, Tahun 2006
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi NTB Skala 1: 250.000, SK. 598/Menhut - II/2009/ Tanggal 2 Oktober Tahun 2009, dan Provinsi NTT Skala 1:250.000 Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 423/Kpts. II/1999/Tanggal 15 Juni Tahun 1999
- Peta Kawasan Pertanian, Skala 1:1.000.000, Kementerian Pertanian, Tahun 2009
- Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Tahun 2012
- Atlas Sumberdaya Kelautan BIG, Tahun 2006
- Peta Sebaran Kawasan Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tahun 2010

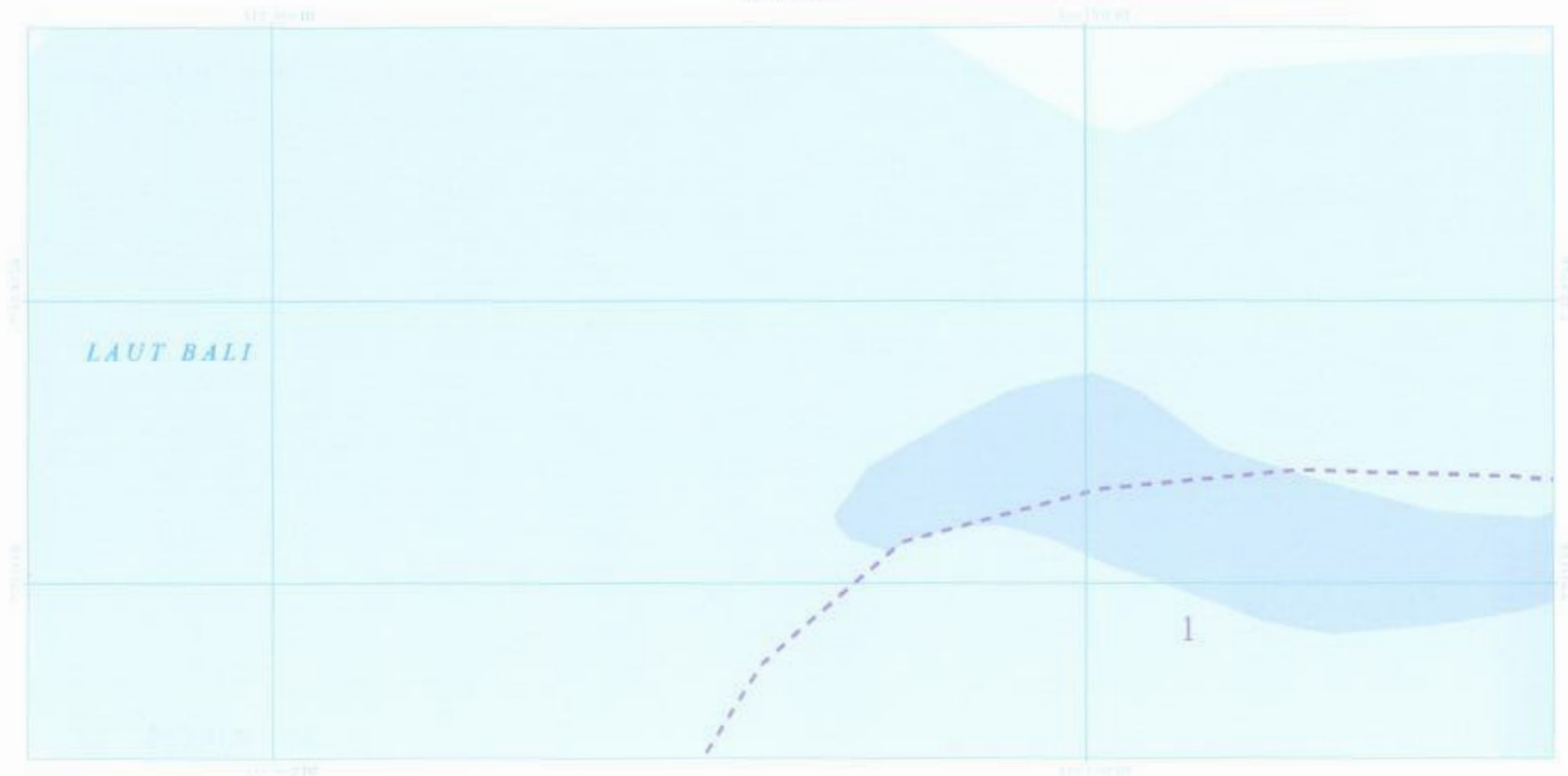
### KETERANGAN PETA :

- Kedalaman Informasi Peta adalah 1:500.000
- Peta ini merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang, dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro serta pemberian izin pemanfaatan ruang
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Garis batas internasional mengacu pada Peta Batas NKRI BIG, Tahun 2011
- Hasil Kajian Tim Teknis RTR Pulau dan Hasil Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

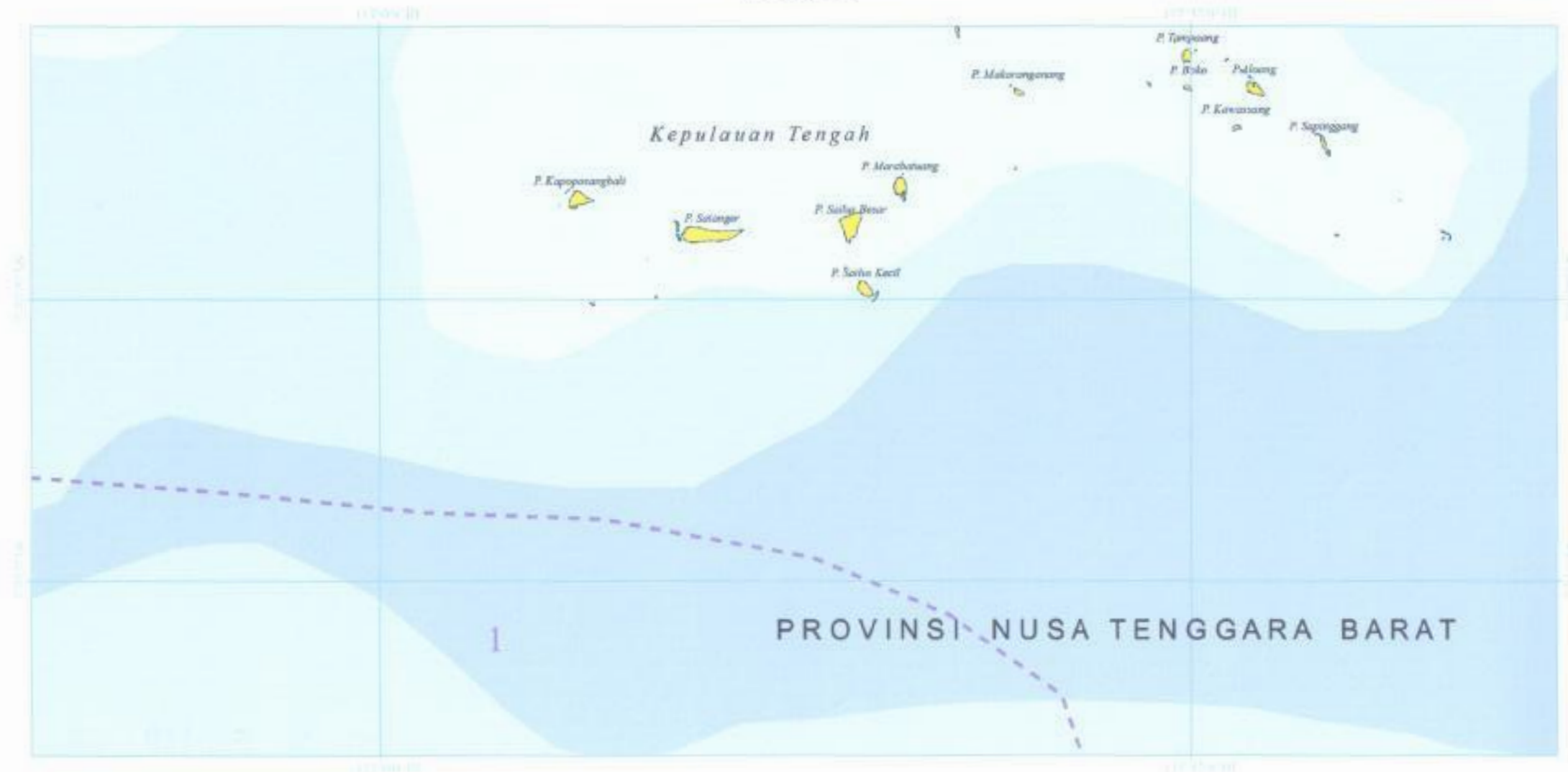
II - 110 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 110 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 110 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 111 - 1

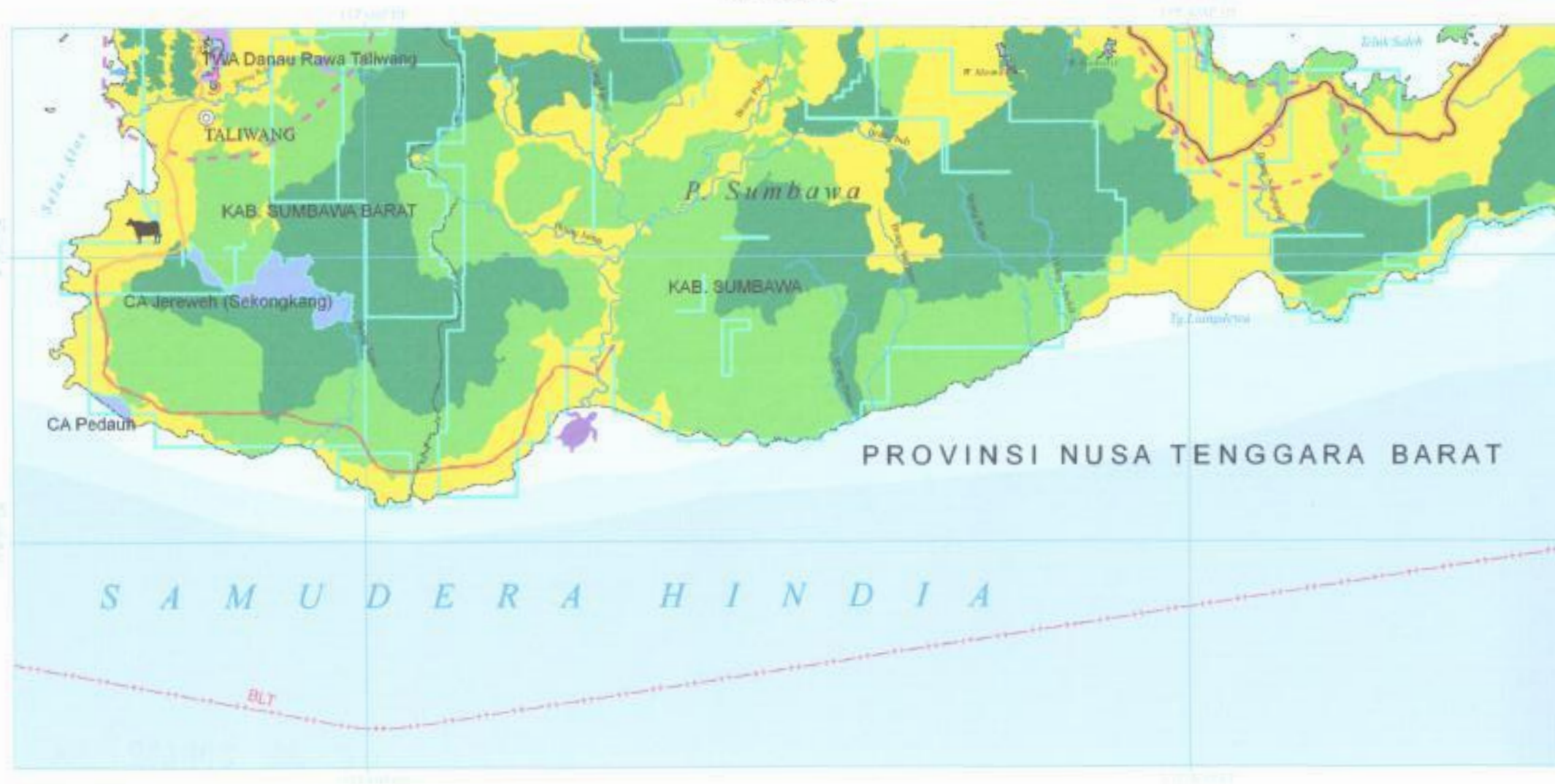






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 111 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 111 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

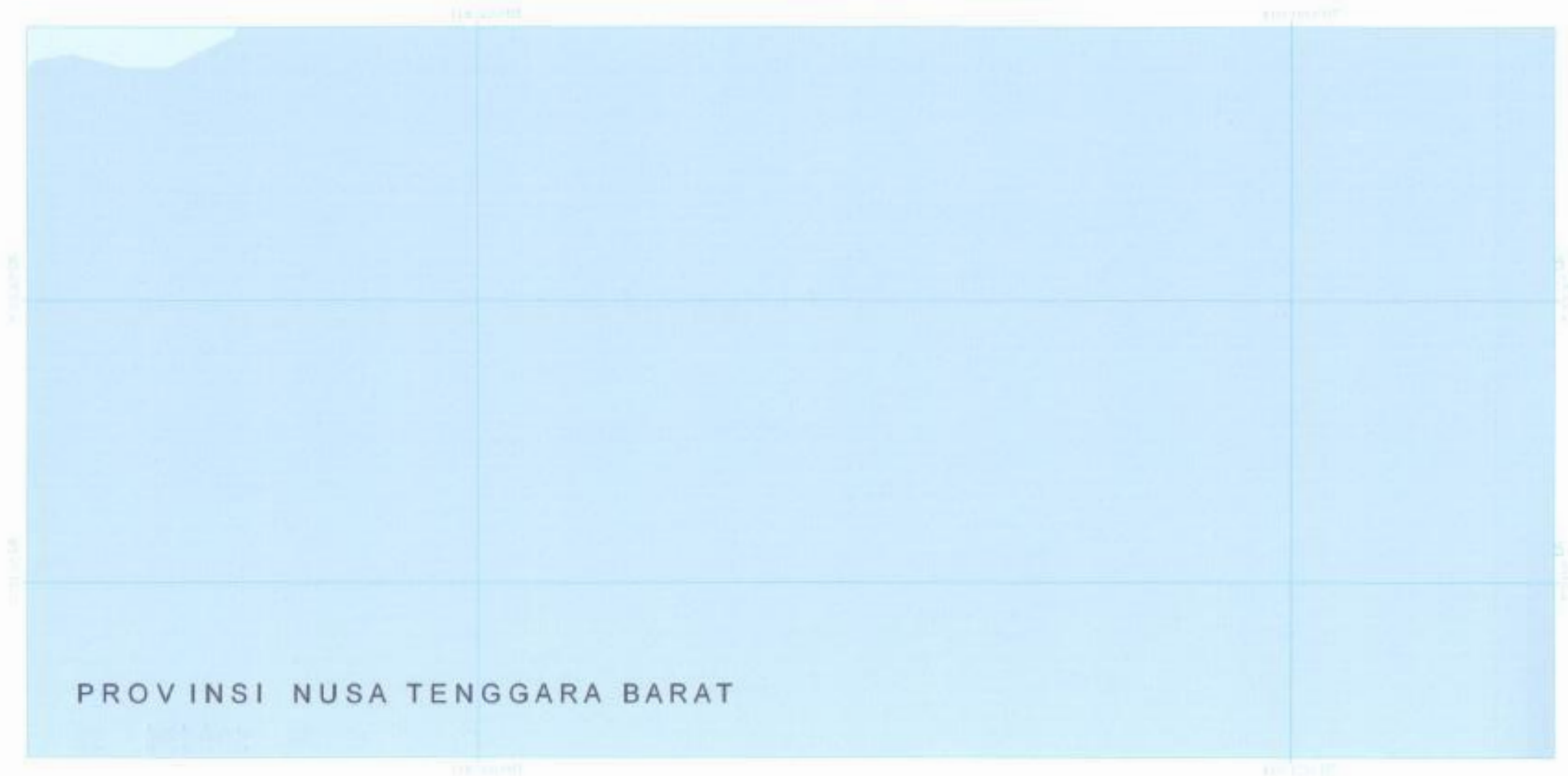
II - 111- 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

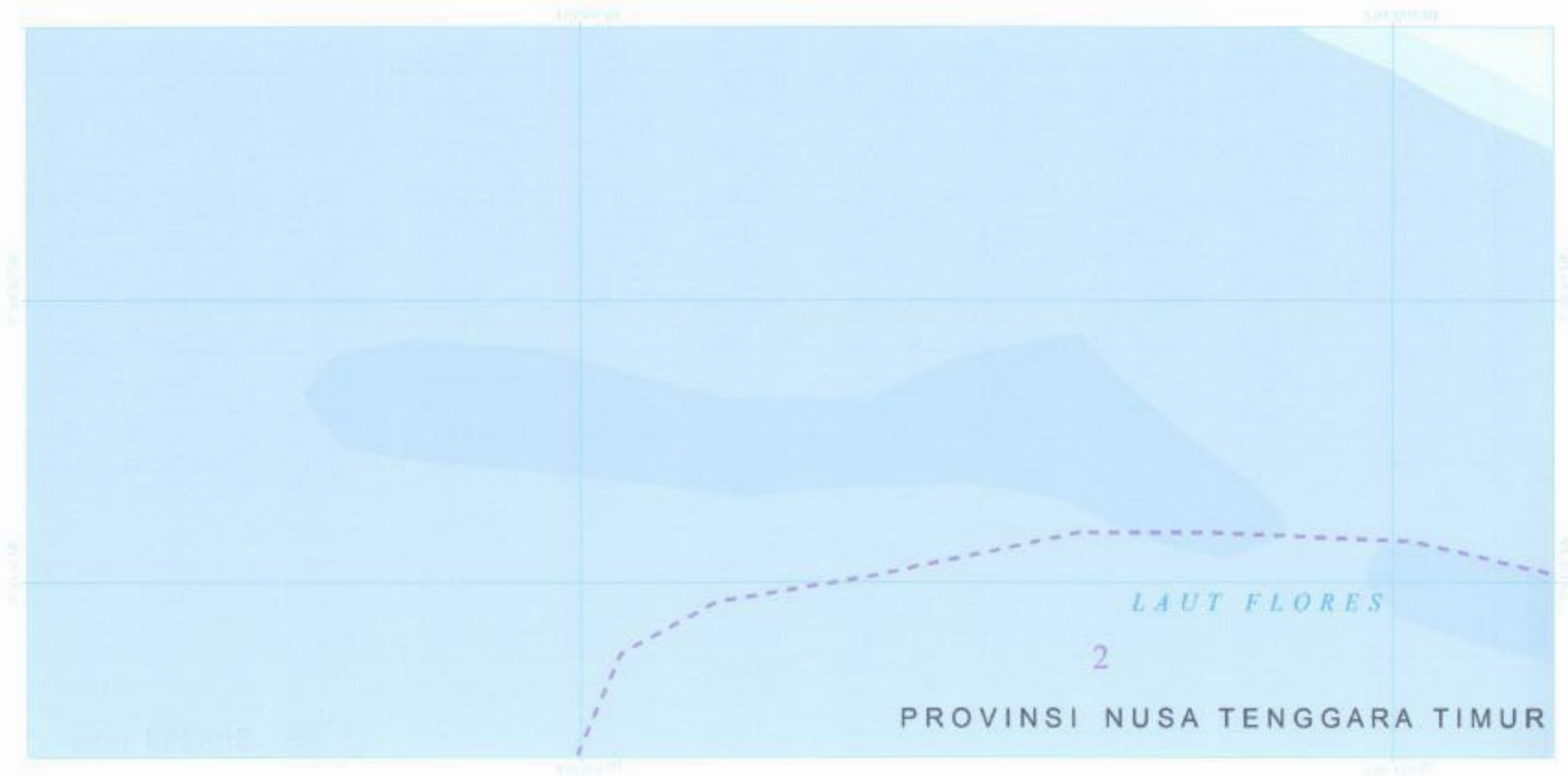
II - 124 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 124 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 124 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 124 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 125 - 1







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 125 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 125 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

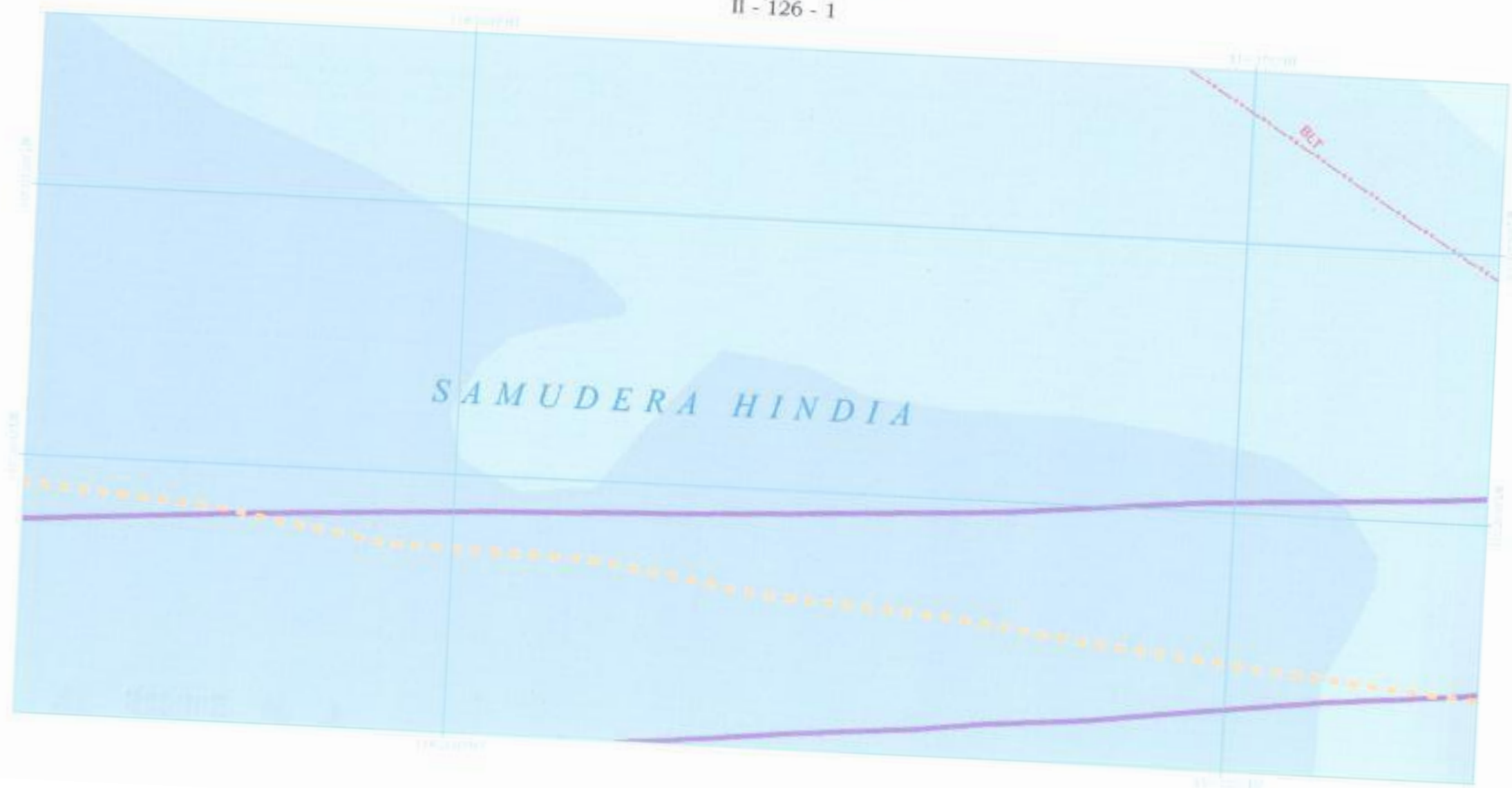
II - 125 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 126 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 126 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 126 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 126 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 127 - 4

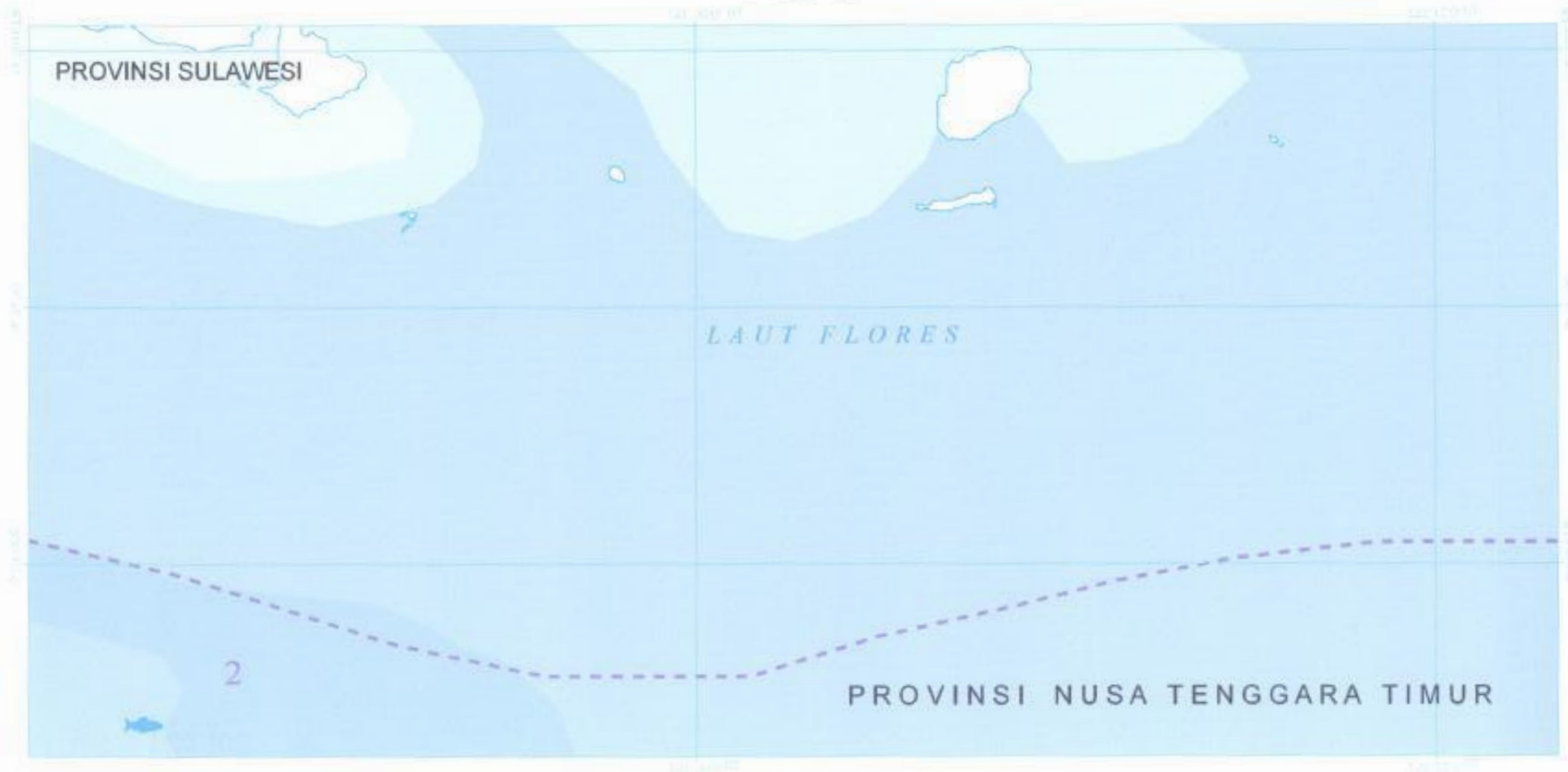






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 139 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 139 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 140 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 140 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

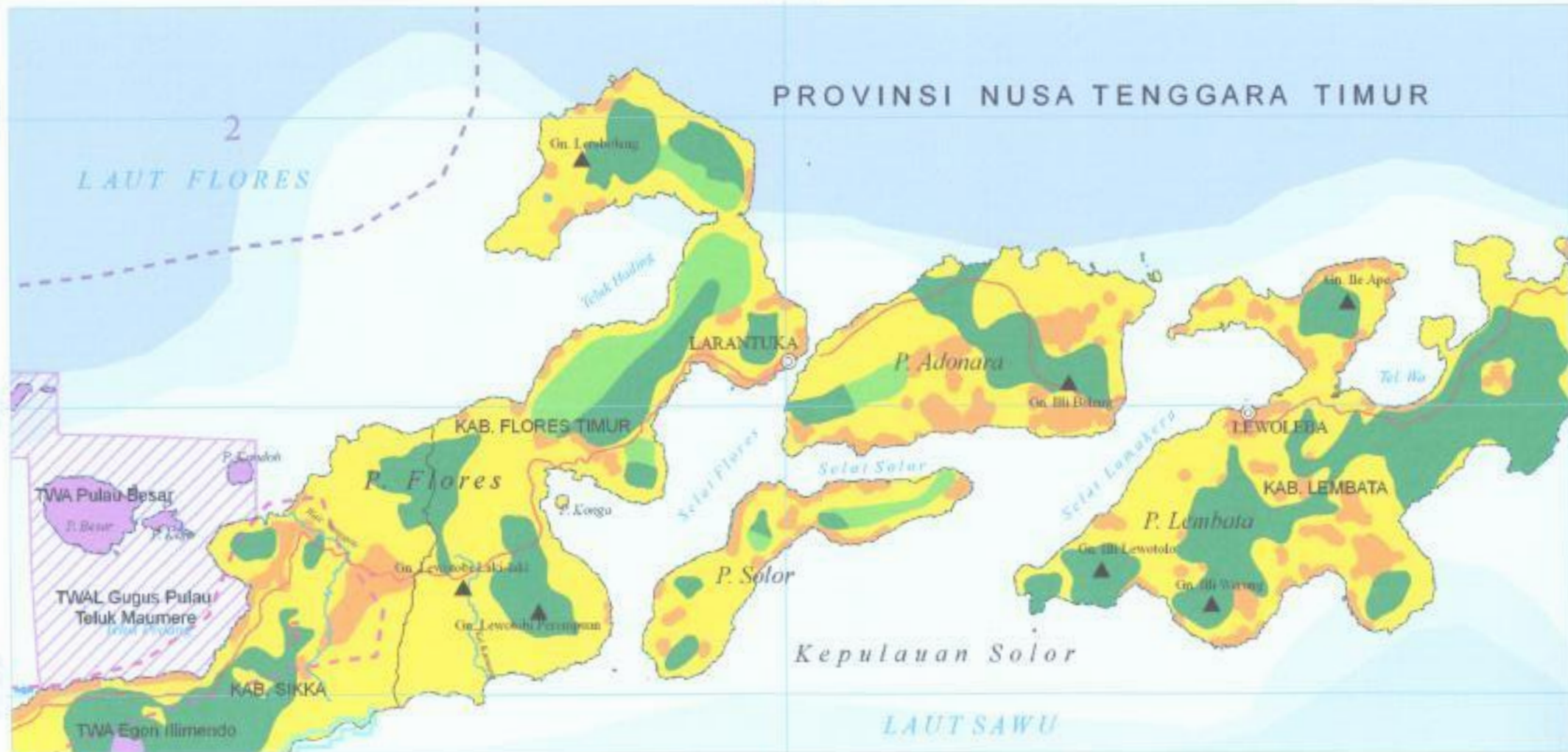
II - 140 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

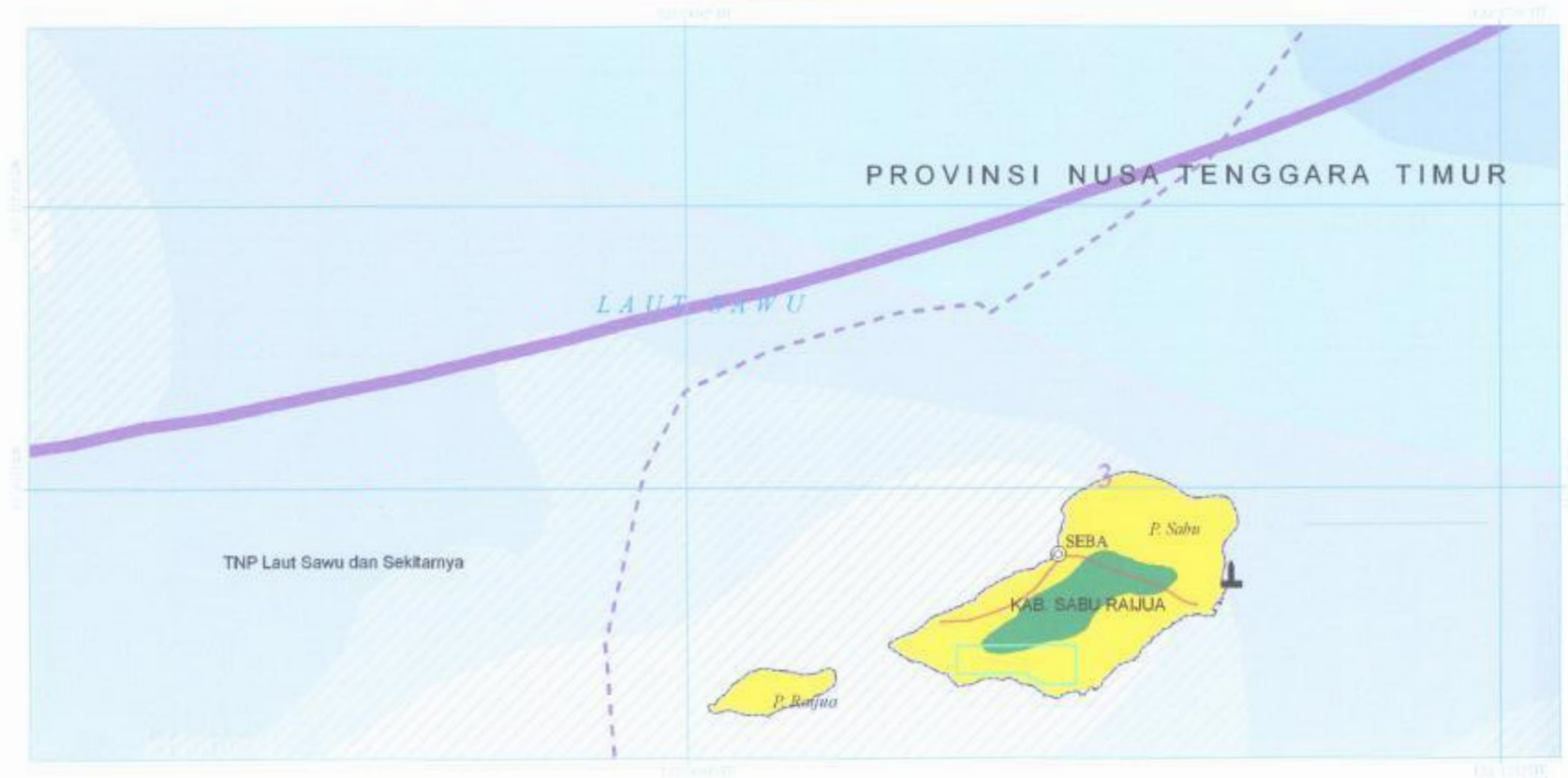
II - 140 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 141 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 141 - 2

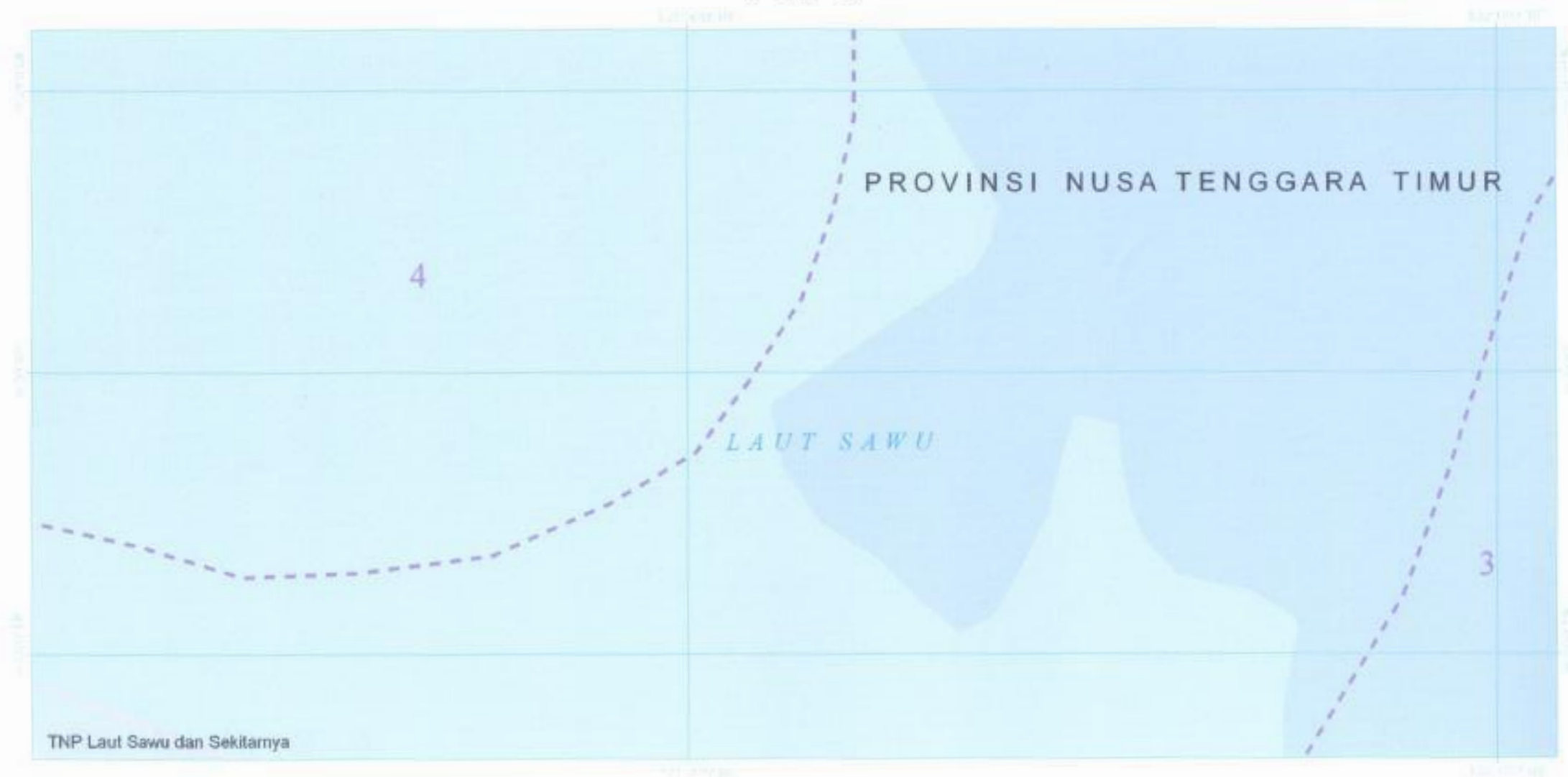






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 141 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 141 - 4

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAUT SAWU

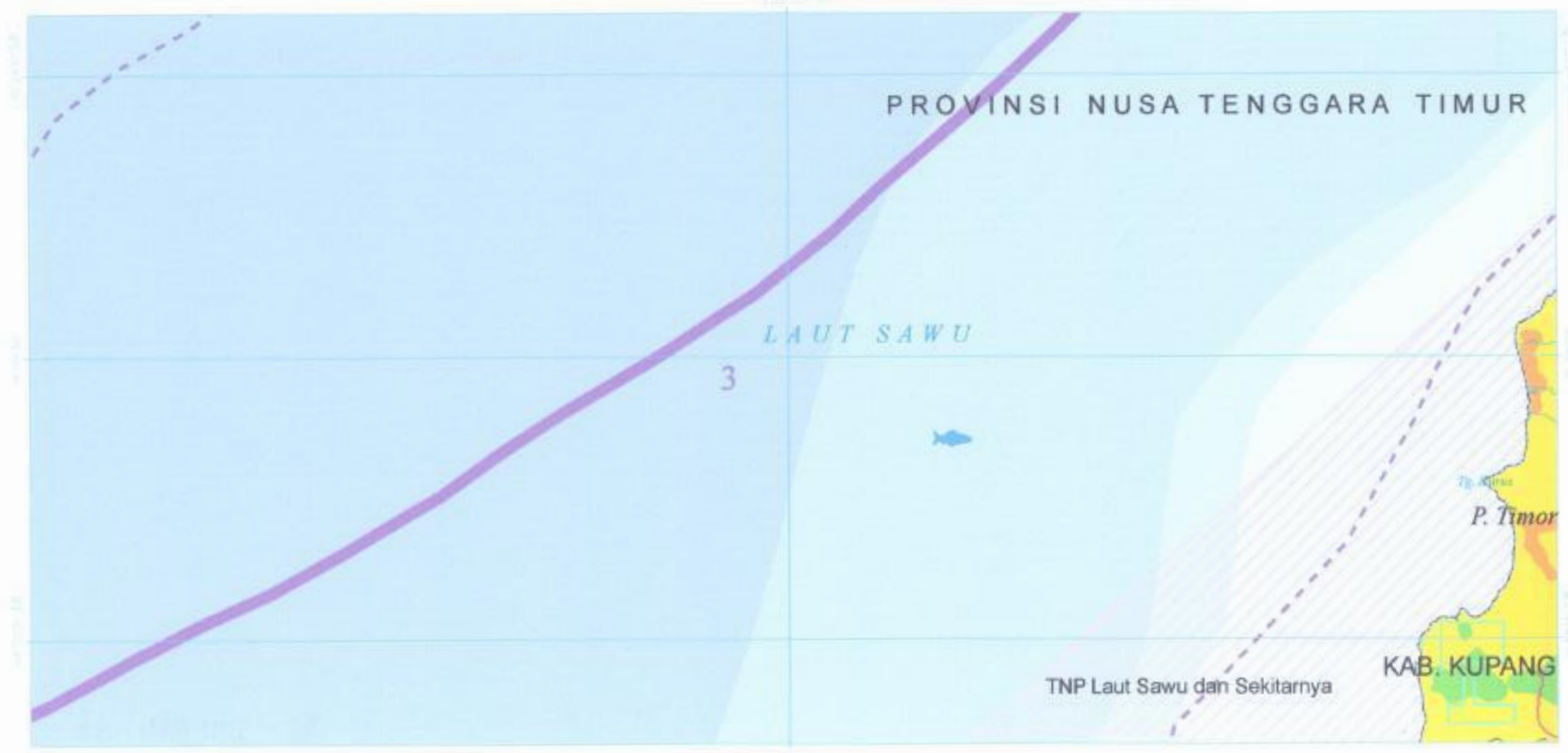
3



P. Timor

TNP Laut Sawu dan Sekitarnya

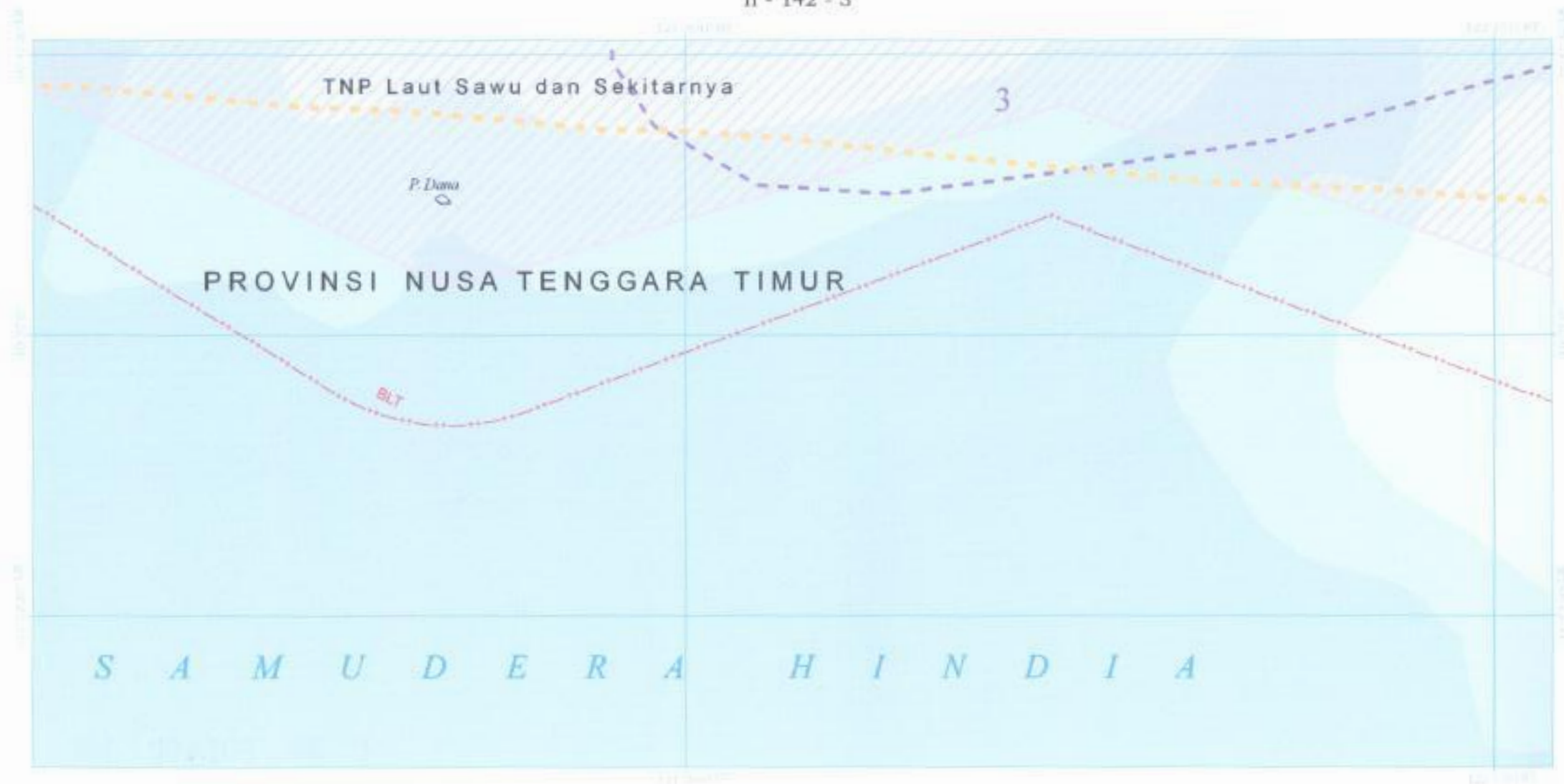
KAB. KUPANG





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 142 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

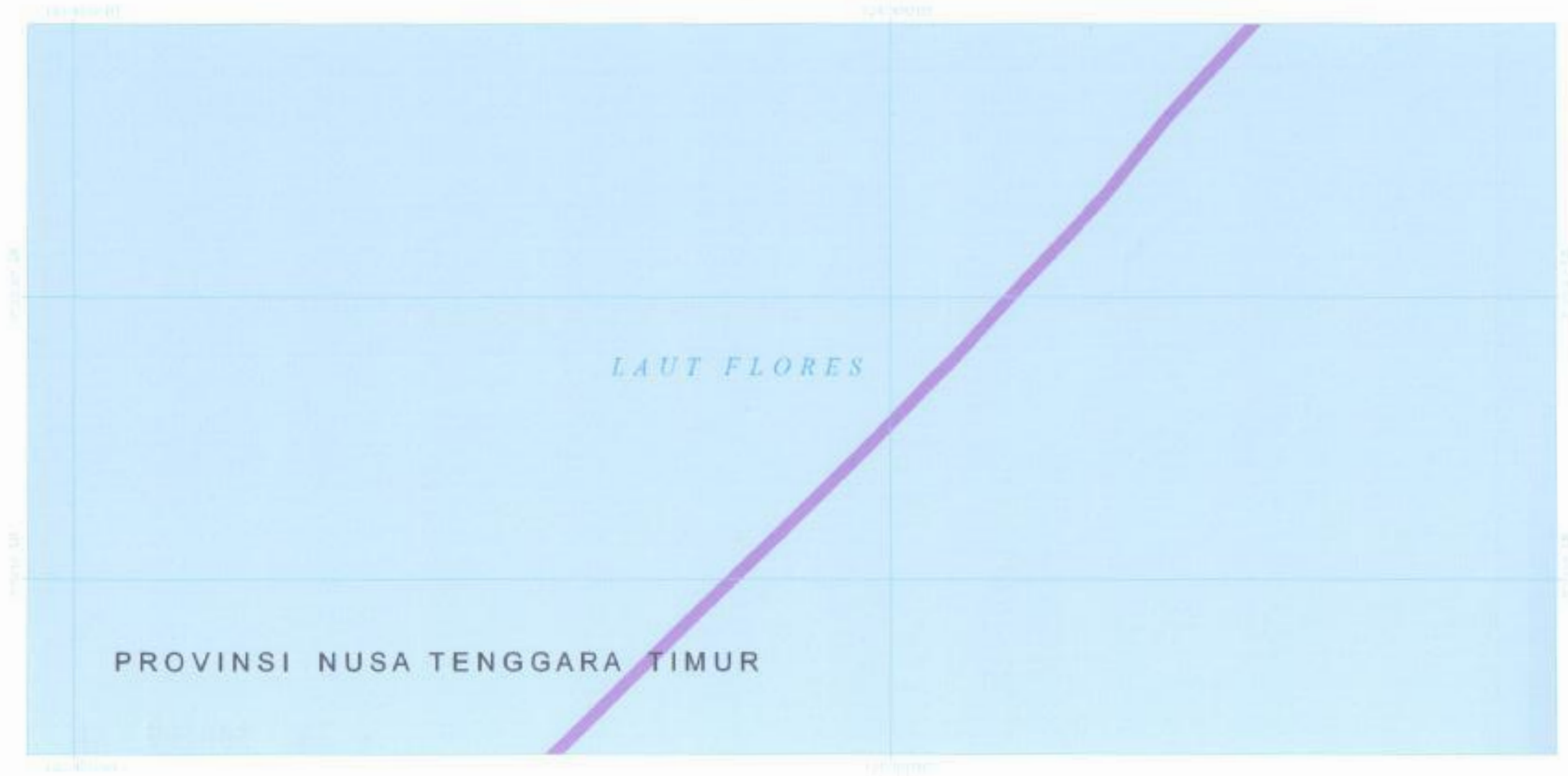
II - 142 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 155 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

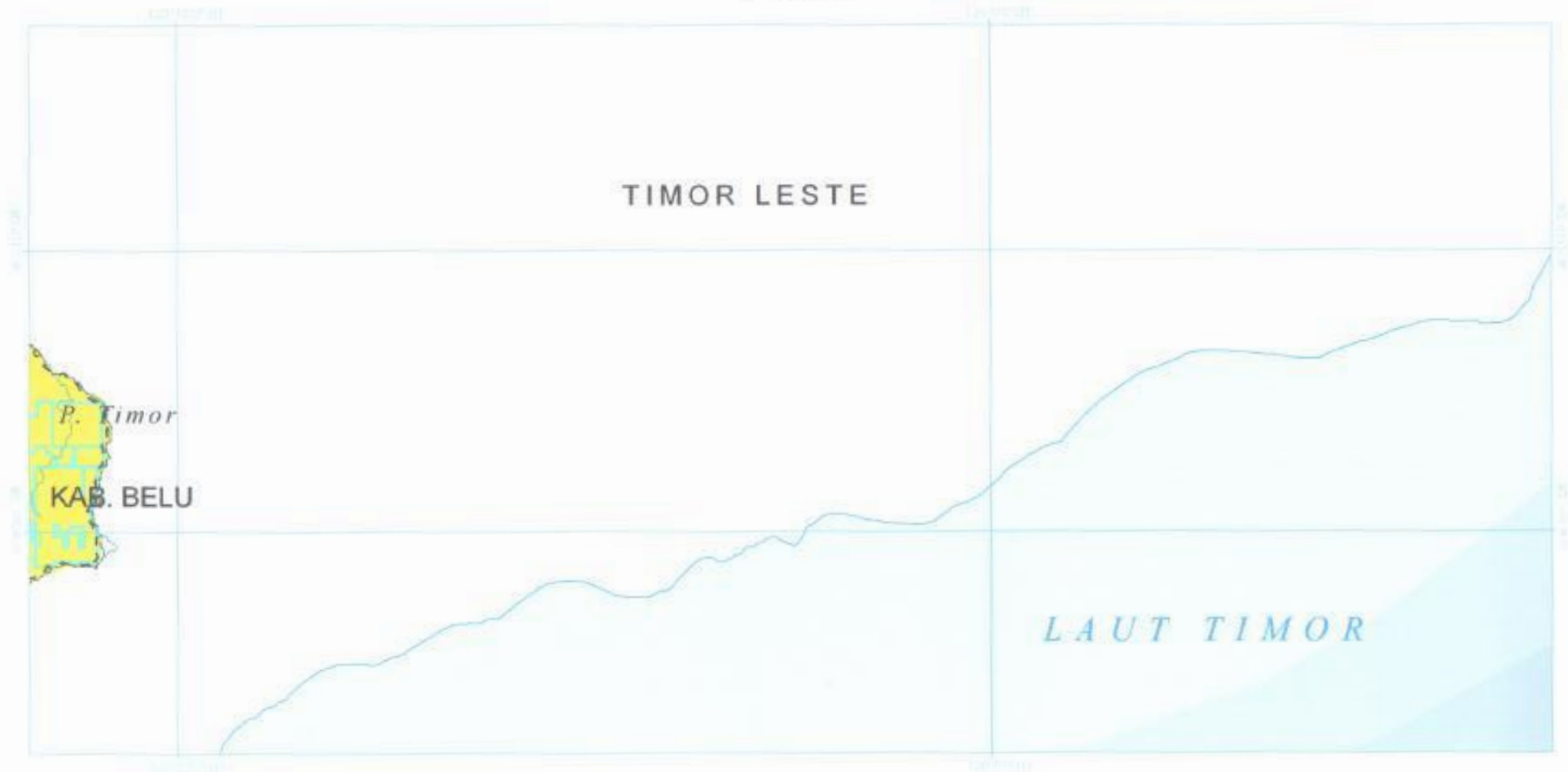
II - 156 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

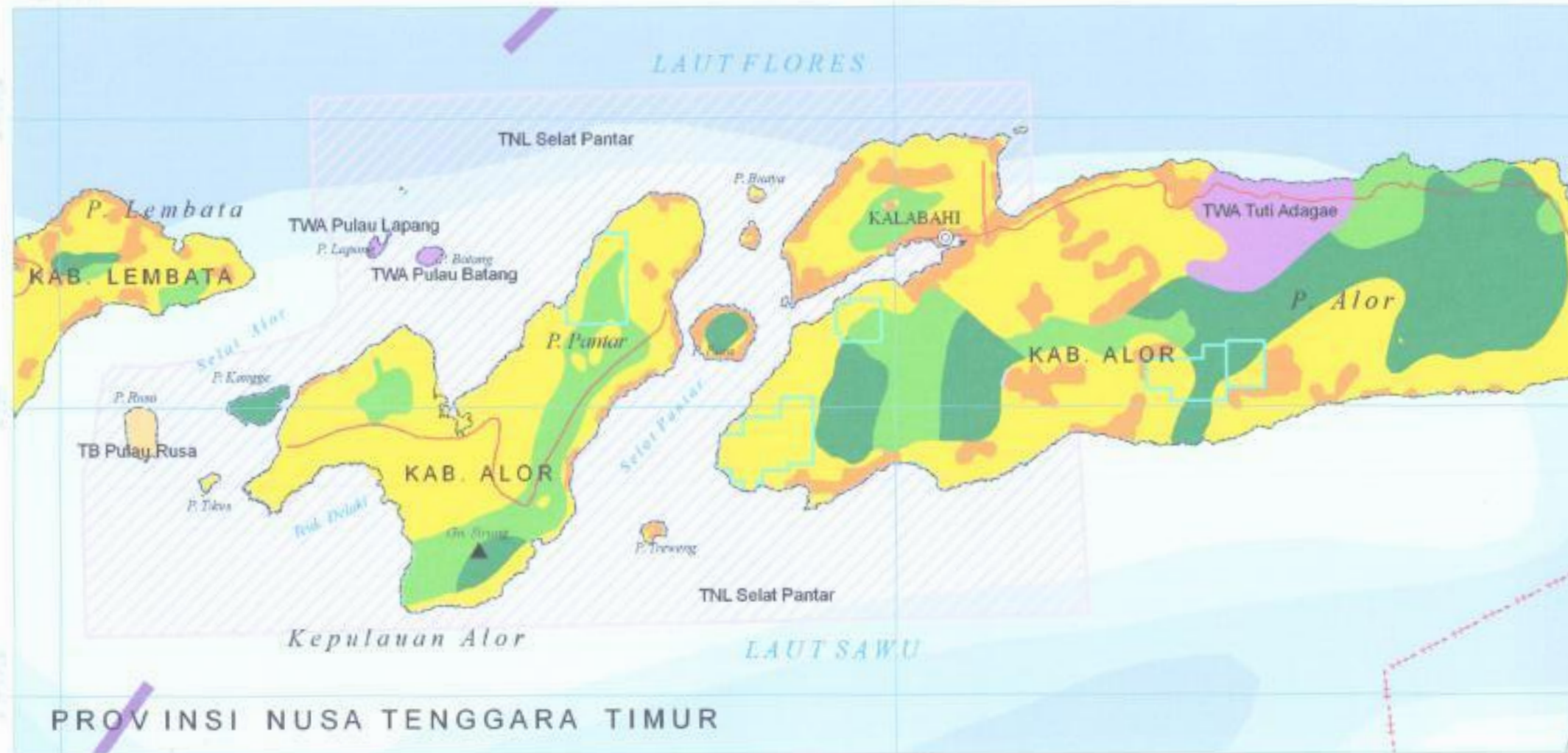
II - 156 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 156 - 3







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

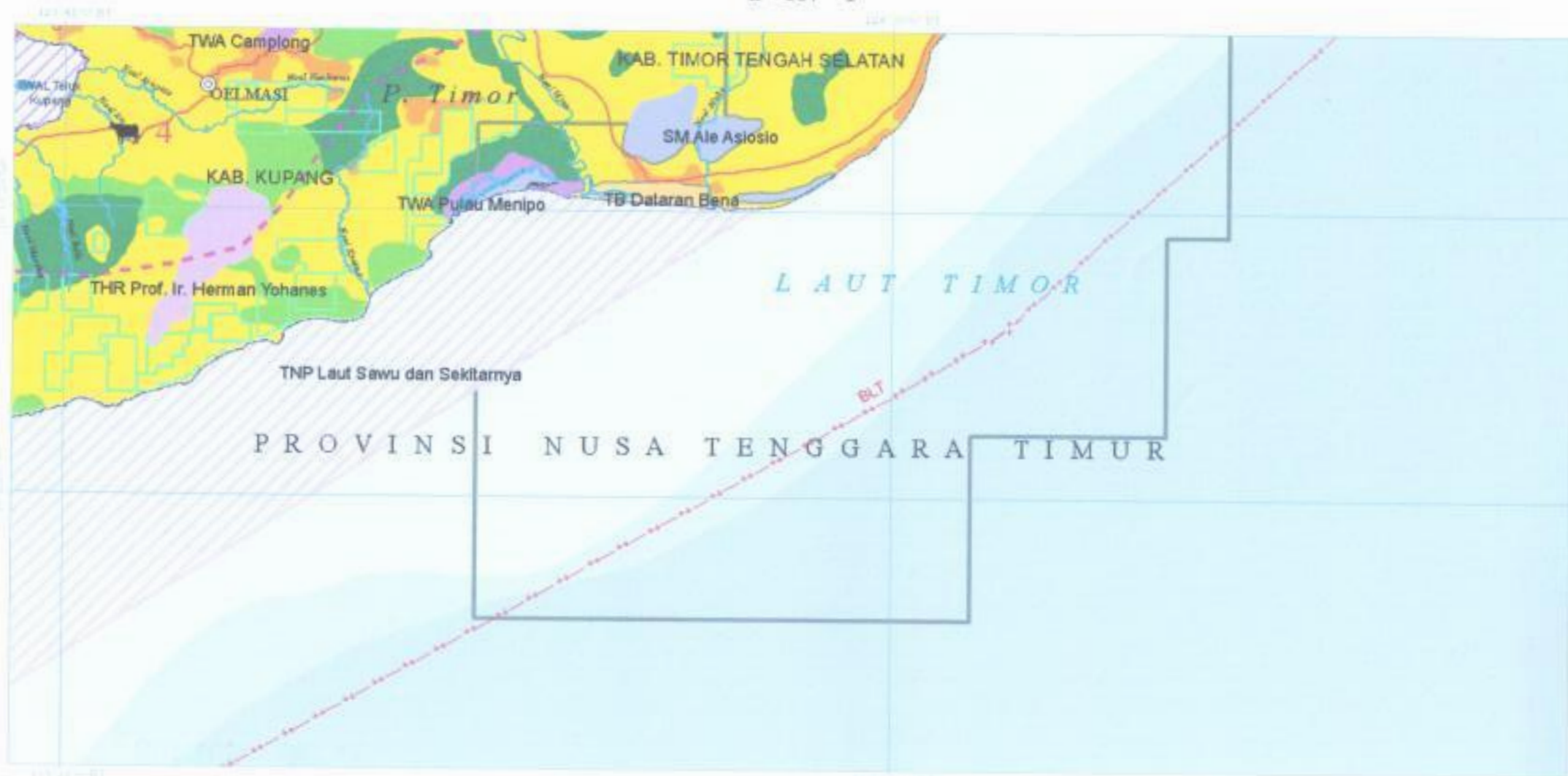
II - 156 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

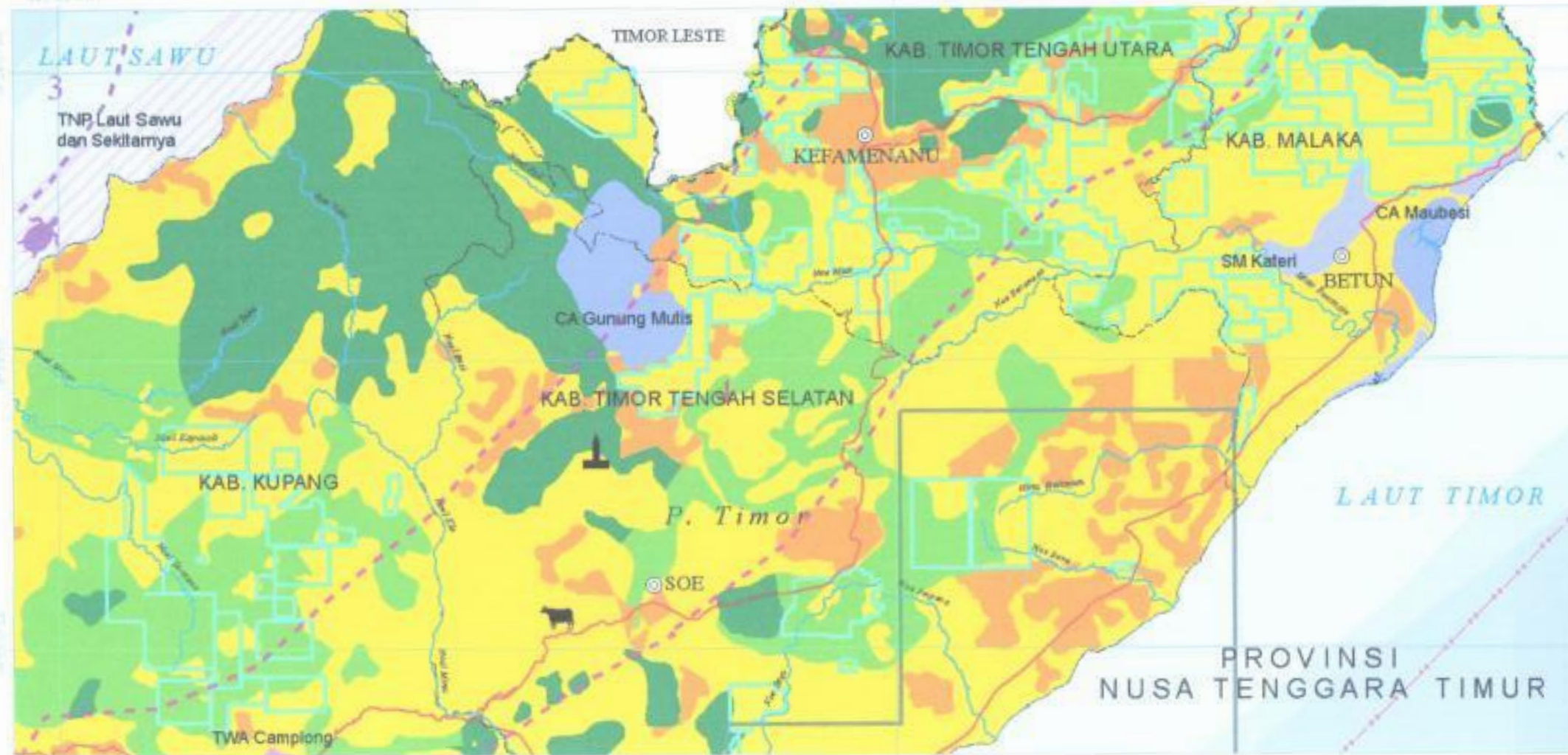
II - 157 - 1





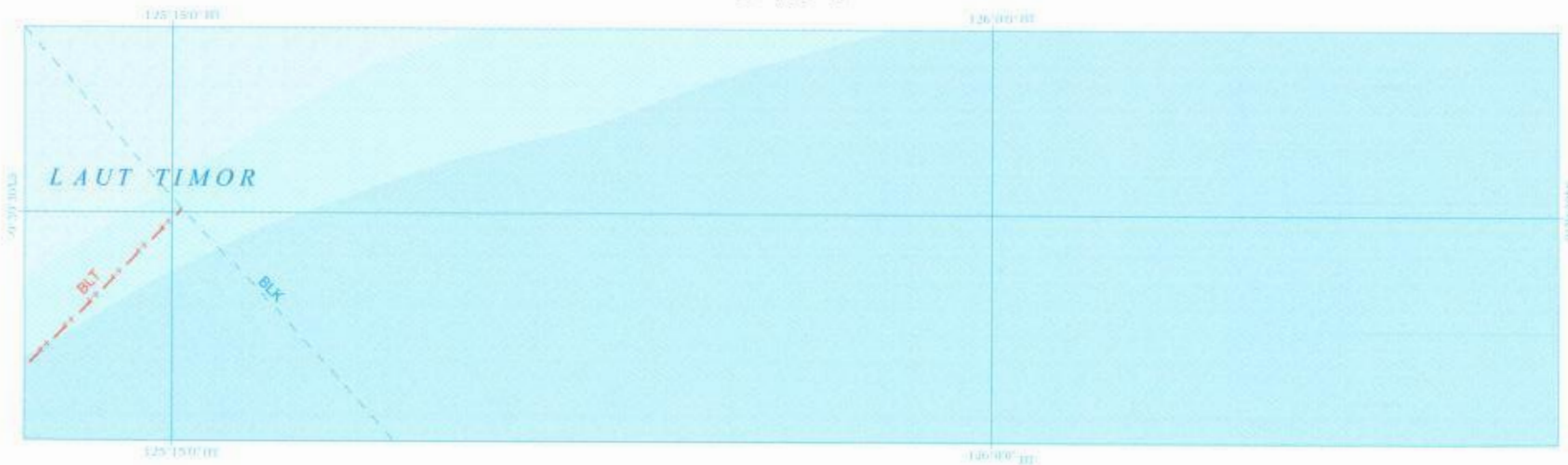
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 157 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II - 157 - 4



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdianti